



135 Hektare Kawasan Kumuh Ditata

UMBULHARJO (MERAPI) - Penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta masih terus dikerjakan. Ditargetkan pada tahun ini kawasan kumuh yang tertangani mencapai 135 hektare untuk mengejar bebas kumuh pada tahun 2019.

"Pekerjaan penataan kawasan kumuh tahun ini sudah mulai terlaksana sekitar 45 persen. Sejauh ini tidak ada kendala apapun dalam pengerjaan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, Kamis (12/7).

Menurutnya, penataan kawasan kumuh pada tahun 2018 seluas 135 hektare ditangani menggunakan berbagai sumber dana. Dari bantuan dana investasi (BDI) dengan target sasaran 80 hektare di 32 kelurahan, Dirjen Pengembangan Kawasan Permukiman target 15 hektare, Pemda DIY 12 hektare, Pemkot Yogyakarta 15 hektare dan dana dari Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) seluas 15 hektare.

"Ada juga dana yang berasal dari swadaya masyarakat, tapi kami belum menghitung target luasan kawasan kumuh yang bisa tertangani," ujarnya.

Wilayah yang menjadi sasaran penataan kawasan kumuh di antaranya di Muja Muju, Sorosutan, Keparakan, Pringgokusuman dan Kecamatan Wirobrajan. Sebagian besar kawasan kumuh yang ditangani berada di bantaran sungai. Penataan dengan memundurkan sebagian rumah warga untuk memberikan ruang bantaran sungai guna jalan inspeksi.

Total luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tersisa sekitar 264 hektare. Luas kawasan kumuh itu kini berkurang seiring dengan penataan di tahun 2017 sebanyak 79 hektare. Penataan kawasan kumuh lalu dilanjutkan di tahun 2018 sampai akhir tahun 2019. Sesuai target nasional di tahun 2019 yaitu 0 persen kawasan kumuh, 100 persen sanitasi dan 100 persen air bersih.

"Target penataan kawasan kumuh masih cukup luas. Tapi kami optimistis bisa memenuhi target itu," tambah Agus.

Selain ditangani pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penataan kawasan kumuh juga melibatkan pihak lain. Dia menuturkan dalam penataan kawasan kumuh juga menerapkan prinsip Gendeng Gendong dengan melibatkan kelompok masyarakat, akademisi dan pelaku usaha.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005